

MAMPU KITA KABAR DARI KITA



KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 17 (PENUTUP) / OKT - NOV 2020

Pesan Penutup dari Team Leader MAMPU

Selama 8 tahun perjalanan Program MAMPU banyak sekali pengalaman, pelajaran, dan keberhasilan yang telah kita capai. Tentu saja kita masih membutuhkan langkah dan strategi untuk terus mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dari pelaksanaan Program MAMPU, ada 3 pelajaran utama yang dapat kita petik:

1. Pentingnya kerja kolaboratif atau kerja kolektif, karena mengupayakan kesetaraan tidak dapat dilakukan sendiri;
2. Pentingnya advokasi untuk perubahan yang lebih baik bagi perempuan. Perubahan sekecil apapun dapat memiliki dampak yang berarti;
3. Keberlanjutan dengan penguatan dan menggunakan jaringan OMS yang sudah ada.



Kate Shanahan

Semoga Program MAMPU dapat menjadi pondasi bagi kerja-kerja pemberdayaan, membuka pintu kolaborasi yang baru bagi para pemangku kepentingan agar pemberdayaan perempuan tetap berlanjut. Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah bekerjasama selama ini khususnya BAPPENAS, DFAT, Pemerintah Daerah, anggota parlemen dan para pemangku Kepentingan lain.

Perempuan Mampu, Indonesia Maju!

Menutup 8 Tahun Perjalanan MAMPU bersama Mitra CSO, Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Perempuan Indonesia

MITRA PELAKSANA MAMPU



Nani Zulminarni
Direktur Yayasan KITA

"Program MAMPU dengan Koalisi Perempuan Indonesia merupakan kemitraan yang berkontribusi positif. Banyak pembelajaran yang Koalisi Perempuan Indonesia dapatkan seperti penguatan kapasitas yang dialami baik secara internal dan eksternal organisasi. Komunitas-komunitas dan struktur Balai Perempuan KPI memiliki banyak sekali peluang untuk penguatan kapasitas."



Nani Zulminarni
Direktur Yayasan KITA

"MAMPU berkontribusi besar dalam memperkuat kepemimpinan perempuan basis. Perempuan-perempuan (basis) ini kemudian bisa memimpin proses perubahan kebijakan-kebijakan di daerah sebagai hasil dari desentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia."



Nisiyah
Direktur KAPAL Perempuan

"Delapan tahun KAPAL Perempuan menjadi bagian dari Program MAMPU menghasilkan banyak pembelajaran. Salah satunya memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di akar rumput merupakan kunci dari mengawal pembangunan, pembangunan yang pro-poor dan responsive gender."



Amin Muftiyannah

Direktur Kasasi

"Melalui MAMPU, Yasanti dapat bekerja sama dengan mitra-mitra MAMPU agar para perempuan pekerja rumahan mendapatkan jaminan sosial dan layanan dasar lainnya. Kerja sama yang dibangun ini sangat positif karena melalui MAMPU kami juga melakukan kerja-kerja kolektif, misalnya terkait dengan SDGs. Model kerja seperti inilah yang perlu dikembangkan dan diperkuat. Dapat melakukan advokasi pekerja rumahan merupakan hal luar biasa yang kami lakukan dengan adanya dukungan MAMPU. Pekerja rumahan kini lebih diakui oleh para pemberi kerja dan pemerintah."



Weni Siregar

Koordinator Seknas FPI

"Kami berharap Pemerintah bisa mendorong program-program seperti MAMPU mulai dari tingkat desa hingga nasional supaya berkesinambungan. Lalu juga aksi-aksi kolektif seperti yang dilakukan MAMPU dimana semua aktivis perempuan dengan berbagai isu bisa saling mendukung pemenuhan hak korban, dimana pemerintah juga memiliki keberpihakan dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada perempuan, melakukan kampanye perempuan sebagai pemimpin dan memenuhi hak konstitusi mereka. Saya berharap semua kerja-kerja kita ini tetap berlanjut."



Fathurozi

Supporting Sistem Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan

"Program MAMPU dibangun berdasarkan suara, aspirasi dan kepentingan perempuan, masyarakat sipil dan juga pemerintah Indonesia. Program MAMPU juga dilaksanakan secara partisipatif, tidak hanya dengan mitra dan pemerintah, namun dengan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga Program MAMPU berhasil mensinergikan, mempertemukan dan menyatukan agenda pemberdayaan perempuan masyarakat sipil dengan agenda-agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender pemerintah."



Nanda Dwinta

Koordinator Masalah Perempuan

"Adanya dukungan kemitraan antar negara seperti Program MAMPU merupakan elemen kunci dalam perubahan sosial. Dukungan Program MAMPU fokus pada membentuk pemimpin perempuan di akar rumput untuk dapat lebih terlibat dalam pembangunan, baik dari aspek kesehatan maupun kesejahteraannya dimana diharapkan dapat terpenuhinya hak-hak perempuan."



Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Meranti CARE

"Terbentuknya DESBUMI dan direplikasinya prinsip DESBUMI oleh Kementerian Tenaga Kerja dalam desa migran produktif (Desmigratif) saya rasa menjadi salah satu capaian signifikan pada penyelenggaraan Program MAMPU. Pada kaitannya dengan teori perubahan yang ada di MAMPU, saya rasa ini sudah merupakan perubahan tahap kedua dan ketiga, di mana pekerja migran bisa menyuarakan aspirasi dan juga sudah ada berbagai upaya pelayanan yang baik untuk perempuan pekerja migran."



Tri Hastuti Nur Rochimah

Koordinator Program MAMPU Aisyah

"Program MAMPU ini didesain dengan proses yang sangat partisipatif. Sejak awal program ini, secara bersama-sama dengan seluruh mitra menentukan isu-isu yang penting yang harus diselesaikan bersama oleh organisasi-organisasi perempuan sebagai satu kesatuan Gerakan perempuan di Indonesia. Dua capaian penting (Program MAMPU) adalah terkait terbukanya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan penurunan stunting. Yang kedua adalah munculnya kebijakan-kebijakan di desa dan kabupaten yang diinisiasi oleh para perempuan untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi."



Dina Lumbantobing

Koordinator Komersial PERMAMPU

"Penelitian yang dilaksanakan PERMAMPU dengan dukungan Program MAMPU ini ternyata menjadi dasar kuat kami dalam mengadvokasi Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) hingga ke akar rumput. Advokasi ini dilakukan bertahap hingga kemudian muncul kekuatan kolektif perempuan yang terjadi berkat pendampingan yang kami lakukan kepada kelompok-kelompok perempuan akar rumput untuk mengadvokasi kebijakan."



Gusran Laitupa

Direktur Yayasan Bakti

"Pelaksanaan Program MAMPU didasarkan pada persoalan mendasar yang dihadapi oleh perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok miskin dan marjinal. Sehingga program, intervensi kegiatan, pendekatan dan strategi yang digunakan sangat partisipatif, setara dan menempatkan seluruh pihak sebagai subjek yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian output dan outcome program."



Andriko Otang

Direktur YPRU

"Keterlibatan kami di dalam Program MAMPU menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena kami mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, strategi dan pembelajaran, tidak hanya dengan sesama MITRA MAMPU, tetapi juga dengan para pekerja rumahan. Kami berhasil membangun wadah kolektif yang disebut Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), di 6 kabupaten/ kota, di 4 provinsi. Melalui MAMPU, kami berhasil meningkatkan kapasitas pekerja rumahan untuk lebih berdaya dalam bernegosiasi dan memperjuangkan hak-haknya. Dengan kemampuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, para pekerja rumahan dapat mengakses berbagai program pemberdayaan ekonomi yang disediakan pemerintah."



Rusdiana

Direktur BITRA

"Kami terkesan dengan Program MAMPU sebab program ini benar-benar peduli terhadap perempuan yang paling rentan dan terpinggirkan, seperti misalnya pekerja rumahan. Selama 8 tahun perjalanan Program MAMPU, BITRA sudah berhasil mengorganisir 1.800 pekerja rumahan dari 3 wilayah yaitu Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat dan Kota Medan, ke dalam Serikat Pekerja Rumahan. BITRA melakukan peningkatan kapasitas pekerja rumahan, sehingga mereka telah memiliki kemampuan bernegosiasi. Yang terpenting, pekerja rumahan sudah sadar bahwa mereka juga pekerja seperti pekerja formal pada umumnya sehingga berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan akses lainnya."



Mariana Amiruddin

Koordinator Komnas Perempuan

"Selama delapan tahun Program MAMPU berjalan bersama Komnas Perempuan, kami mengamati munculnya bibit-bibit pemimpin perempuan mulai dari akar rumput hingga tingkat nasional. Ini menumbuhkan sebuah kekuatan gerakan untuk berkonsolidasi untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia."



Gusti Ayu Bintang Dharmawati

Menaker Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

"Pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia memang diarahkan kepada upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang agar tercipta relasi yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Sebagai isu yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia baik di bidang ekonomi sosial budaya politik kesehatan dan lain-lainnya, kesetaraan gender memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Rumitnya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia berkaitan dengan masih timpangnya akses partisipasi politik dan kesempatan memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dipicu salah satunya oleh nilai-nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat. Hadirnya Program MAMPU selama 8 tahun terakhir ini tentunya membawa banyak perubahan dalam peningkatan kapasitas perempuan dan mendorong gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Keberhasilan Program MAMPU dalam merintis memicu dan memotivasi perempuan-perempuan di akar rumput tentunya direplikasi dan dimodifikasi oleh Pemerintah daerah oleh masyarakat pada umumnya. Selesaiannya perjalanan Program MAMPU bagaimanapun tidak diartikan sebagai terhentinya semua upaya dan cita-cita yang selama ini sudah digelorakan. Perjuangan untuk memberdayakan kaum perempuan tentunya merupakan perjalanan panjang sehingga kita harus lebih erat lagi untuk bersinergi untuk merawat benih yang sudah ditanam MAMPU menjadi sebuah tunas yang bisa terus menebar benih-benih lainnya agar gerakan pemberdayaan perempuan bisa tumbuh subur di Indonesia."

PEMERINTAH INDONESIA



Himawan Hariyoga

Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

"MAMPU telah membuka jalan bagi kaum perempuan untuk dapat mengakses berbagai program layanan sosial, kesehatan, ekonomi, hukum dan juga mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kurang menguntungkan. Bagi CSD Mitra MAMPU, Program MAMPU juga memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan advokasi ke Pemerintah Desa, Pemerintah daerah dan pendampingan ke masyarakat. Advokasi yang dilakukan telah berhasil mendorong kebijakan dan regulasi di tingkat desa dan kabupaten kota yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender. Pendekatan-pendekatan kolaboratif yang dilakukan juga mendorong keterpaduan dan sinergi multi-pihak sehingga manfaat dan dampak yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Praktik baik tersebut menawarkan pendekatan-pendekatan inovatif dalam membangun kemitraan dan sinergi multi pihak antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah desa, pemerintah daerah, anggota legislatif, dunia usaha dan pihak lainnya dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender."



Woro Srihastuti
Sulistyaningrum

Direktur Keuangan, Perempuan, Anak, Pemuda
dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

"Luar biasa. Menurut saya, cara kerja Program MAMPU ini tidak hanya dibankan kepada perempuan-perempuan di akar rumput, tetapi juga dibantu oleh mitra-mitra atau CSO yang juga bekerja dengan sangat luar biasa mempengaruhi pimpinan daerah dan tentunya menguatkan kapasitas perempuan-perempuan di akar rumput untuk bergerak bersama."



Subandi Sardjoto

Dan Dirut Badan Nasional Masyarakat
dan Pemberdayaan Perempuan PPN/Bappenas

"Semakin banyak perempuan yang percaya dengan pentingnya peran mereka di ranah politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, hal ini dicapai tentunya dengan adanya kontribusi dari Program MAMPU. Hal ini juga terbukti dari angka indeks pembangunan gender, di mana di tahun 2012 angkanya 70,7 di tahun 2019 meningkat menjadi 75,24, dan saya yakin, kontribusi Program MAMPU dalam hal ini sangat besar bagi perempuan Indonesia."

PEMERINTAH AUSTRALIA



Allaster Cox

Charge d'Affaires, Australian Embassy Jakarta

"MAMPU telah menjadi inisiatif unggulan kami untuk kesetaraan gender di Indonesia selama 8 tahun. Dan kami sangat bangga dengan apa yang telah dicapai dalam kemitraan ini. MAMPU telah membantu mengatasi isu-isu mendesak mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 147 Kota atau kabupaten di 27 Propinsi di Indonesia. Itu hampir 30% dari seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia dimana separuh penduduk Indonesia bertempat tinggal. Statistik Pemerintah menunjukkan bahwa pekerjaan Mampu di tingkat desa memberikan manfaat bagi sekitar 2,8 juta perempuan yang tinggal di desa-desa ini... kerja MAMPU selama 8 tahun terakhir dan pembelajaran akhir hari ini adalah bukti dari penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap kontribusi organisasi masyarakat sipil bagi pembangunan negara dan pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender."



Aedan Whyatt

Co-ordinator for Poverty and Social Development
Australian Embassy

"Saya sangat kagum akan perjalanan MAMPU selama delapan tahun terakhir. Saat ini MAMPU telah berkembang dari 6 mitra organisasi menjadi 127 cabang lokal serta kemitraan yang kuat di semua tingkatan. Pencapaian penting dari MAMPU adalah pengembangan dan penguatan jejaring. Dengan dukungan MAMPU, mitra masyarakat sipil telah membentuk lebih dari 3.000 kelompok lokal di tingkat desa dengan lebih dari 70.000 anggota perempuan. Jejaring ini akan sangat penting untuk terus memajukan kesetaraan gender dan mendukung peran perempuan dalam pemulihan Indonesia dari COVID-19 di masa depan."



Kirsten Bishop

Minister Counsellor Governance and
Human Development Australian Embassy

"Selama tiga tahun terakhir saya sangat terkesan dengan tim MAMPU dan jaringan masyarakat sipil yang bekerja di lebih dari 1.000 desa di Indonesia. Mitra MAMPU telah bekerja secara kolektif untuk membantu mewujudkan perubahan kebijakan penting yang berpihak kepada perempuan di berbagai bidang."





Tonggak Sejarah dan Pencapaian Program MAMPU

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) adalah inisiatif delapan tahun yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Indonesia. MAMPU bertujuan untuk berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan menguatkan jaringan dan koalisi organisasi perempuan dan yang berorientasi gender ('mitra' MAMPU), agar dapat mempengaruhi kebijakan dan peraturan, dan meningkatkan akses perempuan miskin terhadap program dan layanan penting pemerintah.

MAMPU dilaksanakan dalam dua tahap: MAMPU Fase I antara April 2013 dan Juni 2016, dan MAMPU Fase II antara Juli 2016 hingga Desember 2020. Sesuai konteks tahun 2012, MAMPU dirancang sebagai program jangka panjang untuk memanfaatkan potensi kapasitas gerakan perempuan Indonesia untuk mempengaruhi reformasi pemerintah. MAMPU memberikan dana hibah (grant), bantuan teknis dan berbagai bentuk dukungan lain bagi jaringan mitra MAMPU yang bekerja di lima bidang tematik: [1] meningkatkan akses perempuan ke program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia; [2] meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja; [3] memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri; [4] meningkatkan kesehatan dan status gizi perempuan; dan [5] mengurangi kekerasan terhadap perempuan (KTP).

MAMPU menerapkan pendekatan strategis dengan landasan 'Teori Perubahan' - yang menunjukkan adanya keterhubungan antara hasil yang diharapkan dengan berbagai kegiatan program. Berdasar teori ini, dukungan MAMPU akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kesiapan mitra MAMPU untuk melakukan aksi kolektif, yang memungkinkan terjadinya peningkatan suara dan pengaruh, sehingga menghasilkan perbaikan akses terhadap layanan penting bagi perempuan miskin dan keluarga mereka. Tiga keluaran ini merupakan hasil akhir Program MAMPU (End of Program Outcome - EOPD).

Untuk mencapai EOPD ini, MAMPU menerapkan cara dan menggunakan instrumen untuk mendukung jaringan berbagai organisasi yang bekerja dengan cara berbeda untuk mempengaruhi perubahan yang menguntungkan perempuan di

seluruh Indonesia. Bukti menunjukkan bahwa mekanisme ini, pada umumnya, bekerja dengan baik. Selama Fase II, MAMPU mengalokasikan lebih dari AUD 25 juta dalam bentuk dana hibah (grant) disertai bantuan teknis dan dukungan lain kepada jaringan yang terdiri dari 127 mitra langsung dan organisasi lokal yang bekerja di 27 provinsi. Bentuk pengambilan keputusan kolaboratif yang dibangun melalui MAMPU telah menjadi atribut utama dari sistem kerjasama ini, mempertemukan para mitra secara teratur untuk membahas arah dan prioritas kolektif. Pada saat yang sama, dalam struktur ini, MAMPU menghubungkan mitra dengan lembaga pemerintah nasional serta media.

Dukungan ini berkontribusi pada pergeseran positif kapasitas mitra, yang sejalan dengan EOPD MAMPU. Penilaian kapasitas menunjukkan bukti bahwa pada tahun 2020 sebagian besar mitra MAMPU menjadi organisasi yang lebih mapan dan berkelanjutan, dibanding tahun 2017. Dengan bantuan MAMPU, mitra telah membentuk 'basis massa' kelompok perempuan lokal di 1.137 desa di 27 provinsi. Penelitian dan pemantauan kualitatif yang dilakukan MAMPU menunjukkan bahwa anggota kelompok perempuan telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan, yang terpenting adalah keberanian, yang menjadi dasar bangunan utama untuk pemberdayaan. Terciptanya ruang informal yang aman membantu menumbuhkan modal sosial perempuan dan memperluas jaringan mereka dari waktu ke waktu. Sistem data MAMPU (MANIS Kita) juga menunjukkan bahwa sejak 2016 antar mitra lebih sering bekerja satu sama lain, dan membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lain di luar jaringan MAMPU. Penggerak signifikan dari peningkatan hubungan ini adalah kolaborasi untuk pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bersama dengan ini, para mitra dan pemerintah daerah juga telah mengembangkan pengaturan kerjasama yang lebih erat untuk meningkatkan pengadaan layanan, khususnya layanan bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan. Hubungan yang lebih erat dengan media di seluruh jaringan MAMPU juga tercermin dan peningkatan profil organisasi mitra dan visibilitas isu dan kegiatan MAMPU di media-media daerah dan nasional.

MAMPU telah memungkinkan mitra untuk mengembangkan dan menyempurnakan solusi terhadap kendala yang memengaruhi akses perempuan terhadap layanan pemerintah. Misalnya, KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi), layanan keliling



penanganan pengaduan yang dikembangkan oleh Yayasan PEKKA, salah satu mitra MAMPU, mengembangkan keterampilan kader desa dalam memobilisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan penyedia layanan perlindungan sosial pemerintah kepada perempuan dan laki-laki di daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Model lain yang dikembangkan KAPAL Perempuan adalah Sekolah Perempuan, dimana mereka mengembangkan keterampilan dan kapasitas kolektif perempuan akar rumput untuk memainkan berbagai peran kepemimpinan, termasuk membantu masyarakat mengakses skema jaminan kesehatan nasional. Kedua model ini dan pendekatan lainnya digunakan mitra untuk menunjukkan kepada pembuat kebijakan solusi 'nyata' untuk mengatasi hambatan akses terhadap layanan.

Perubahan dalam kapasitas dan kesiapan mitra ini mendorong peningkatan suara dan pengaruh, konsisten dengan EOPO MAMPU. Kontribusi dari mitra MAMPU terbukti dengan adanya 647 keputusan resmi oleh pembuat kebijakan di pemerintahan dan parlemen. Keputusan ini menyangkut mulai dari peraturan desa

Meningkatkan Kapasitas dan Kesiapan Perempuan untuk Aksi Kolektif

Ada tiga tahapan dalam teori perubahan Program MAMPU. Berkembangnya kapasitas dan kesiapan perempuan untuk melakukan aksi kolektif, merupakan bagian awal dari teori perubahan yang digunakan sebagai dasar implementasi Program MAMPU. MAMPU berkontribusi kepada tujuan besar peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Pada tahapan awal, Program MAMPU fokus mendukung beragam pengembangan kapasitas internal mitra, pengelolaan finansial, pelaksanaan peneliban baseline program, pengembangan dan perluasan jaringan kerja dan koalisi dengan beragam organisasi dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Pada awal Program MAMPU, kapasitas lembaga diurus dahulu. Kami [PERMAMPU] diperiksa keseluruhan sistem keuangan dan struktur organisasi sebagai bagian dari teori perubahan MAMPU yang pertama. Benar-benar disiapkan institusinya, baru kami mengembangkan dan mendampingi kelompok-kelompok perempuan. Sehingga mereka [kelompok perempuan] mampu melakukan advokasi kebijakan." ucap Dina Lumbantobing, Koordinator Konsorsium PERMAMPU dalam Konferensi Pengakhiran Program MAMPU 8 Oktober 2020.

dan kabupaten hingga hukum nasional, termasuk keputusan pemerintah yang mengadopsi model seperti KLIK dan Sekolah Perempuan untuk direplikasi secara lebih luas. Berbagai sumber bukti menunjukkan bagaimana perempuan telah bekerja secara kolektif untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, pengaruh mitra terhadap kebijakan nasional memunculkan contoh signifikan, termasuk adanya revisi Undang-Undang Perkawinan 1974 untuk meningkatkan usia minimum pernikahan bagi anak perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Contoh lainnya terkait inisiatif Kementerian Tenaga Kerja untuk mereformasi secara nasional, layanan bagi jutaan pekerja migran luar negeri Indonesia, dimana sebagian besar adalah perempuan. Meskipun iklim politik semakin tidak bersahabat, advokasi oleh mitra MAMPU telah membantu menempatkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam agenda legislatif nasional, prospek yang tampak sulit dicapai ketika MAMPU dimulai.

Sejumlah besar perempuan dan laki-laki juga telah memperoleh akses terhadap berbagai layanan. Data menunjukkan bahwa mitra MAMPU telah membantu secara langsung lebih dari 139.000 perempuan dan 37.000 laki-laki untuk mengakses berbagai layanan penting termasuk untuk memperoleh dokumen identitas hukum, asuransi kesehatan pemerintah, dan pemeriksaan kanker serviks. Mitra telah membantu merevitalisasi layanan pemerintah untuk korban dan penyintas KTR yang masih belum mapan, berkontribusi pada peningkatan penanganan kasus dan rujukan. Secara tidak langsung, MAMPU telah berkontribusi pada peningkatan akses yang lebih luas, karena pemerintah daerah melakukan perubahan kebijakan yang berdampak pada peningkatan pelaksanaan layanan.

Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) bersama mitra lain yang fokus pada isu pekerjaarumahan, yaitu Trade Union Rights Center (TURC) dan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) di awal pelaksanaan Program MAMPU mengumpulkan data terkait pekerjaarumahan yang selama ini belum pernah dilakukan. Data ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan kegiatan yang dilakukan Yasanti.





"Saat kami memulai Program MAMPU, pekerja-rumahan belum terorganisir. Oleh karena itu kami saat itu mulai dengan mengumpulkan data pekerja rumahan dan beragam tantangan yang mereka hadapi. Setelah data tersebut dikumpulkan dan dianalisa, kami kemudian membentuk kelompok-kelompok pekerja rumahan. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian berproses menjadi serikat pekerja rumahan. Melalui kelompok dan serikat ini lah kami meningkatkan kapasitas perempuan pekerja rumahan melalui sekolah yang kami bentuk bernama Sekolah Perempuan Pekerjarumahan." ungkap Amin Muftiyannah, Direktur Yasanti.

KAPAL Perempuan dan mitra kerja di daerah yaitu Yayasan Kajian Pemberdayaan Manusia (YKPM), Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Pondok Pergerakan dan Pembangkit Batang Terendam (PBT) menguatkan kapasitas perempuan melalui Sekolah Perempuan dan memperluas jangkauan sekolah ke berbagai wilayah baru.

"Kapal Perempuan dan mitra-mitra di daerah melakukan pemberdayaan perempuan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan melalui wadah belajar Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan Nusantara yang tersebar di wilayah terpencil kepulauan, pegunungan, pesisir, semi-urban, di antara masyarakat adat dan miskin kota. Saat ini kepemimpinan perempuan sudah mulai terbangun, pada mereka yang tidak memiliki garis silsilah kekuasaan apapun di desanya." tukas Misyah, Direktur KAPAL Perempuan.

Selama delapan tahun perjalanan Program MAMPU, Konsorsium PERMAMPU, KAPAL Perempuan, Yasanti, BITRA, mencapai beragam keberhasilan dalam menguatkan kapasitas dan kesiapan perempuan untuk mendorong perubahan positif dalam dirinya dan lingkungan tempat mereka tinggal dan wilayah yang lebih luas.

PERMAMPU berhasil membentuk 557 kelompok perempuan, merangkul lebih dari 26.000 perempuan akar rumput yang tersebar di 8 provinsi di Sumatera. Melalui pendekatan Credit Union yang merupakan pintu masuk pemberdayaan perempuan khas Konsorsium PERMAMPU, telah mengumpulkan kapital sejumlah IDR 49.347.045.373 dan menyalurkan pinjaman berjumlah IDR 51.594.479.941 kepada perempuan anggota kelompok yang digunakan untuk beragam kegiatan seperti modal usaha atau modal untuk bertani. Perempuan anggota kelompok Credit Union PERMAMPU juga bekerjasama dengan forum beragam pemangku

kepentingan (Forum Multi Stakeholder) membuka akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan miskin di wilayah kerja PERMAMPU.

KAPAL Perempuan melalui pendekatan Sekolah Perempuan memiliki beragam capaian yang membanggakan. Melalui pos pengaduan Sekolah Perempuan, KAPAL Perempuan menguatkan kapasitas 6.400 kader perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dan menyelesaikan lebih dari 34.000 permasalahan perlindungan sosial, mendampingi 7.500 perempuan miskin memperoleh dokumen identitas hukum dan mengakses Jaminan Kesehatan Nasional. KAPAL Perempuan juga memengaruhi 148 kebijakan dan peraturan, mulai dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi untuk memastikan agar beragam program perlindungan sosial dapat diakses oleh perempuan miskin dan kelompok marginal lainnya. Model Sekolah Perempuan telah direplikasi di beberapa kabupaten, dan sudah mencapai 210 Sekolah Perempuan.

BITRA telah berhasil mengorganisir lebih dari 1800 pekerja rumahan di 3 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan membentuk Serikat Pekerja Rumahan Sumatera Utara. Para pekerja rumahan yang telah berserikat ini kemudian membentuk 29 kelompok ekonomi yang menjalankan beragam usaha-usaha mikro yang diprakarsai para pekerja rumahan.

"BITRA melakukan peningkatan kapasitas pada kelompok pekerja rumahan. Keterampilan mereka dalam melakukan pekerjaannya meningkat, mendapatkan pula kemampuan untuk bernegosiasi upah serta sudah sadar bahwa mereka (pekerja rumahan) juga pekerja seperti yang memiliki hak serupa dengan pekerja formal lainnya." Diana, Direktur BITRA.

Yasanti yang juga fokus pada isu pekerja rumahan perempuan, telah berhasil mengorganisir perempuan pekerja rumahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui Sekolah Perempuan Pekerjarumahan untuk menjadi pemimpin perubahan di wilayah tempat tinggal mereka. Sejak 2014 hingga sekarang, telah terbentuk lebih dari 3.000 kelompok perempuan pekerja rumahan di desa dengan anggota lebih dari 70.000 perempuan.

Keberhasilan terbesar kerjasama Yasanti, BITRA dan TURC yang didukung oleh Program MAMPU adalah dibentuknya Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), yang akan terus berjuang untuk memenuhi hak-hak pekerja rumahan di Indonesia.

Kondisi lapangan yang beragam, mendorong munculnya kreativitas para mitra dalam mengembangkan kapasitas perempuan, sehingga mereka jadi berdaya. Diawali dengan peningkatan kapasitas individu dan organisasi, kemudian meluas ke peningkatan kapasitas komunitas sehingga terjadi perubahan positif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan di desa, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Diharapkan sejumlah kelompok atau serikat perempuan yang sudah terbentuk selama perjalanan MAMPU, terus memimpin perubahan positif di wilayah tempat tinggalnya hingga tingkat nasional untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia.

Memperkuat Suara dan Pengaruh Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan



Pada tahap jangka menengah, Program MAMPU berharap suara dan pengaruh perempuan meningkat di berbagai tingkatan pengambilan keputusan sebagai hasil jangka menengah. Suara perempuan akar rumput berkontribusi pada perencanaan pembangunan. Peningkatan suara dan pengaruh perempuan ini diharapkan dapat membuat perempuan menjadi lebih terlibat dalam pembuatan keputusan.

Selama 8 tahun, MAMPU dan para mitra mendorong perempuan untuk mempengaruhi lebih dari 700 kebijakan di tingkat daerah hingga nasional. Dalam meningkatkan suara dan pengaruh, Program MAMPU melalui Yayasan BaKTI meningkatkan keterlibatan parlemen untuk perlindungan terhadap perempuan dengan mendorong inisiatif reses partisipatif. Reses partisipatif adalah proses konsultasi kelompok konstituen perempuan di akar rumput dengan para pimpinan parlemen lokal. "Tadinya di wilayah-wilayah target Program MAMPU di mana BaKTI bekerja, hampir tidak ada perda yang berasal dari usulan DPRD. Salah satu hasil reses partisipatif ini adalah munculnya tujuh perda yang diusulkan oleh anggota DPRD. Semuanya berhubungan dengan perlindungan anak dan perempuan," jelas Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI pada Konferensi Pengakhiran Program MAMPU pada 8 Oktober lalu.

Pernyataan ini juga didukung oleh Idrus, Kepala Dinas PPPA Kabupaten Maros, "Melalui Program MAMPU, Yayasan BaKTI telah mendampingi Pemerintah Kabupaten Maros dalam melahirkan lima perda strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Perda ini telah membawa perubahan dan berdampak, bahkan beberapa penghargaan telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Maros diantaranya penghargaan

Kabupaten Layak Anak dan Anugerah Parahita Eka Praya untuk Pembangunan Pengarusutamaan Gender."

Komnas Perempuan dengan dukungan Program MAMPU berkontribusi pada suara dan pengaruh di tingkat nasional, khususnya pada pengembangan kebijakan. Komnas Perempuan telah mendorong disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). "Meski saat ini prosesnya belum selesai, namun dari catatan 8 tahun terakhir ini, saya melihat isu kekerasan seksual dan RUU P-KS tidak hanya dikawal oleh Komnas Perempuan sendiri atau lembaga pengadaan layanan. Isu ini juga telah dikawal oleh dukungan publik dan gerakan yang besar," terang Lily Danes, Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan.

Selain itu, dalam mendorong perubahan yang lebih baik bagi perempuan, Migrant CARE juga berhasil mendorong diterbitkannya UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) serta penguatan suara perempuan di akar rumput melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). "Secara paralel saat kita melakukan advokasi UU PPMI, kita melihat juga peluang untuk bekerja secara konkret di tingkat desa, karena hampir 99% pekerja migran datang dari desa," jelas Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE. Wahyu juga menyebutkan bahwa sering terjadi praktik-praktik buruk di tingkat desa dalam proses keberangkatan pekerja migran seperti misalnya pemalsuan dokumen. "Kalau kita bisa mensinergikan langkah-langkah ini di tingkat desa - misalnya adanya pengawasan dari aparat dan masyarakat desa, pengusulan dana desa untuk pelindungan pekerja migran - dengan advokasi tingkat nasional, maka pekerja migran terutama perempuan dapat bermigrasi dengan lebih aman."

Jaleswari Pramodhawardhani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden RI turut mengapresiasi upaya Migrant CARE pada perlindungan pekerja migran. "Apa yang dilakukan pemerintah sendiri saja tidak akan seluas dan setalam dengan ketika pemerintah bisa bekerjasama dengan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil seperti Migrant CARE, serta organisasi dan komunitas pekerja migran lainnya di berbagai bidang."

Peningkatan suara dan pengaruh perempuan juga dilakukan mitra Program MAMPU lainnya yakni Trade Union Rights Centre (TURC), secara khusus kepada perempuan pekerja rumahan. "Melalui peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh TURC, pekerja rumahan menjadi terlibat dalam pengambilan keputusan secara strategis di tingkat desa dalam musrenbang dan musyawarah desa. Saat ini mereka juga terlibat sebagai tim perumus RPJM Desa. Dalam strategi-strategi advokasi kebijakan yang dibuat TURC, kelompok pekerja rumahan itu di terlibat di dalamnya. Pekerja rumahan saat ini juga dapat mengakses layanan-layanan permodalan dan BPJS yang disediakan oleh Pemerintah," jelas Andy Akbar, Deputi Direktur TURC.

Pini Sukarti, salah satu pekerja rumahan di Sukoharjo yang merupakan dampingan TURC menuturkan, "Dulu kami hanya bekerja sesuai dengan pesanan dan dengan upah seadanya. Saat ini kami sudah dapat menegosiasikan upah kami dengan para pemberi kerja. Selain itu kami juga sudah tergabung dalam organisasi JPRI dan mengadakan pertemuan seminggu sekali. Bersama teman-teman di organisasi, kami mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha peyek kacang."

Capaian penting selama 8 tahun Program MAMPU lainnya adalah berhasilnya advokasi organisasi masyarakat sipil dalam mendorong disahkannya beberapa undang-undang penting bagi perlindungan perempuan, seperti perubahan pasal dalam UU Perkawinan tahun 1974 untuk mencegah perkawinan anak. Pasal ini menyangkut batas minimal usia perkawinan perempuan yang berhasil diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. "Advokasi mengenai isu perkawinan anak ini dimulai dari temuan-temuan



yang didapatkan dari anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah cabang yang berbasis di desa yakni Balai Perempuan. Kemudian KPI melakukan dua kali judicial review ke Mahkamah Konstitusi yakni di 2014 yang gagal, lalu kemudian diterima sebagian di tahun 2017. Kami kemudian kembali meyakinkan parlemen saat itu hingga pada akhirnya batas usia perkawinan menjadi 19 tahun disetujui di akhir 2019," jelas Mike Verawat Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia. Namun tantangan implementasi masih mengintai, "Sosialisasi perubahan batas usia ini belum merata, terutama di tingkat lokal, misalnya di tingkat daerah bahkan KUA. Menjadi penting bahwa selain revisi undang-undang, juga harus kuat instruksi ke level daerah."

Pada akhirnya pemberdayaan perempuan dengan memperkuat suara dan pengaruh harus dilakukan dalam berbagai lapisan, yang dapat dimulai dari tingkatan akar rumput misalnya melalui DESBUMI dan JPRI. Lewat reses partisipatif, aspirasi perempuan juga dapat didengar langsung oleh anggota parlemen sehingga dapat menghasilkan perda-perda yang ramah terhadap perempuan dan anak. Di tingkat nasional, mitra MAMPU juga mendorong terbentuknya dukungan massa untuk RUU P-KS dan penguatan payung hukum dengan disahkannya UU PPMI dan naiknya usia minimal perempuan dalam UU Perkawinan. Ini semua merupakan kontribusi Program MAMPU dan mitra-mitranya dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020 - 2024) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Layanan Bagi Perempuan

Dengan kapasitas yang sudah terbangun, para mitra MAMPU mengembangkan beragam model pendekatan untuk memberdayakan perempuan, menguatkan tindakan kapasitas kolektif, serta mencoba solusi alternatif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi perempuan di **1.137 desa, 147 kabupaten/kota di 27 provinsi di Indonesia**.

Mitra MAMPU beserta kelompok perempuan akar rumput membangun jaringan dan koalisi dengan parlemen dan pemerintah di tingkat nasional dan lokal, tokoh adat, budaya dan agama, maupun organisasi masyarakat sipil lain diluar MAMPU untuk mendorong aksesibilitas perempuan miskin terhadap program dan layanan pemerintah.

Secara langsung, MAMPU telah membantu **139.000 perempuan** mengakses layanan pemerintah. Sedangkan, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Program MAMPU bermanfaat secara tidak langsung bagi sekitar **2,8 juta perempuan** yang tinggal di desa-desa wilayah kerja MAMPU. Keterlibatan dan kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan diwujudkan aksesibilitas terhadap layanan dasar. Selain itu, adanya temuan model pendekatan yang beragam diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya pemberdayaan perempuan ke depannya.

Dalam sesi Dialog 3 yang mengangkat topik "Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Layanan bagi Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif" dalam Konferensi

Pengakhiran Program MAMPU, 8 Oktober 2020 lalu yang dipandu oleh Moderator Rory Asyari, Program MAMPU mengundang empat Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berhasil menunjukkan sumbangsih luar biasa mereka bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, yaitu Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Aisyiyah, sebagai kelompok perempuan Muhammadiyah yang mengedepankan Islam yang berkemajuan, membentuk dan mengembangkan kelompok Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) di 100 desa di 15 kabupaten yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Kegiatan kolektif perempuan di tingkat akar rumput dilaksanakan dengan wadah BSA, yang kini telah mencapai lebih dari 451 kelompok. Melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh kader dan anggota kelompok BSA, Aisyiyah telah menjangkau lebih dari 12.000 perempuan untuk melakukan tes IVA, Pap Smear dan sadarnis. Selain fokus terhadap kesehatan reproduksi perempuan, Aisyiyah juga mendukung prioritas nasional pemerintah untuk menekan prevalensi stunting, melalui inisiatif Rumah Gizi, yang telah memberi manfaat kepada lebih dari 8.700 perempuan anggota BSA yang tersebar di 36 desa wilayah kerja MAMPU - Aisyiyah.

Menurut Tri Hastuti, Manajer Program MAMPU-Aisyiyah, salah satu strategi unik yang dilakukan Aisyiyah melalui Program MAMPU adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Dalam melakukan edukasi di tingkat komunitas, kami menggunakan pendekatan komprehensif. Komprehensif itu artinya kita meyakini bahwa isu kesehatan tidak semata-mata isu biologis dan medis, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan interpretasi budaya dan agama," tutur Tri Hastuti. Aisyiyah juga gencar melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah, untuk menindak-lanjuti implementasi dari peraturan yang sudah disahkan, seperti dikatakan oleh Rinin Dewi Wulandari, Ketua MAMPU PWA Jawa Barat, "pada akhirnya yang cukup berat tantangannya adalah menjaga atau mempertahankan capaian-capaian berupa peraturan desa, komitmen anggaran, jaringan, dan seterusnya itu untuk terus berkelanjutan yang akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan bagi Desa."

Program MAMPU mendukung Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) bersama Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) yang tersebar di 15 wilayah di Indonesia untuk melakukan studi terkait akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hasil studi digunakan untuk mendukung advokasi berbasis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak paham bahwa JKN dapat dimanfaatkan untuk layanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi, pengobatan infeksi menular seksual (IMS), dan perawatan pasca keguguran. "Jadi kami melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif itu dari tahun 2015 sampai 2017, sebanyak tiga kali. Sedangkan yang kualitatif satu kali di tahun 2019. Dari setiap hasil penelitian yang kami lakukan kemudian dijadikan basis advokasi dalam dialog publik di 15 wilayah ini bersama tokoh masyarakat, akademisi, media, dan tentunya Pemerintah Daerah terkait," ujar Herna Lestari, Ketua YKP berbicara, masih dalam sesi Dialog yang sama.

Menurut Herna, kerjasama pemerintah dan masyarakat serta berbagai pihak sangat krusial dalam menanggulangi masalah kesehatan reproduksi. Penelitian yang dilakukan YKP ini membangun kesadaran pemerintah tentang isu-isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Di Lampung ternyata kesehatan reproduksi remaja masih belum mendapatkan perhatian. JP2K melakukan advokasi dan berhasil mendorong Pemerintah Provinsi Lampung mengesahkan peraturan Dinas Kesehatan tentang Layanan Kesehatan Reproduksi bagi remaja Perempuan.

Nani Zulminarni, Direktur Eksekutif Yayasan PEKKA turut berbagi pengalaman kerja sama antara Yayasan PEKKA dengan Program MAMPU. Model unggulan yang diinisiasi oleh PEKKA adalah KLIK PEKKA. "KLIK PEKKA merupakan satu inisiatif yang dibangun atas keprihatinan begitu banyaknya kelompok-kelompok masyarakat terkekskusi dari layanan perlindungan sosial khususnya karena mereka tidak ada di dalam data," jelas Nani. Hampir 25% keluarga di Indonesia dikepalai oleh perempuan, komposisi yang cukup besar, dan rentan berada pada posisi kelompok termiskin di Indonesia. "Jadi melalui KLIK PEKKA inilah kemudian kader-kader PEKKA, pemimpin perempuan kepala keluarga di akar rumput yang telah dilatih dengan sangat intensif, dikembangkan kepemimpinannya melalui Program MAMPU, mengorganisir KLIK PEKKA dan masyarakat miskin yang tidak terdata untuk datang dan berdialog langsung menyampaikan persoalannya kepada Pemerintah untuk menepati kewajibannya memenuhi hak masyarakat miskin tersebut." Selama 8 tahun membangun kemitraan bersama Program MAMPU, melalui proses panjang membangun kapasitas kelompok dan relasi dengan pemerintah, Yayasan PEKKA bersama Serikat Pekka di 433 desa di 20 provinsi telah berhasil melaksanakan 458 KLIK PEKKA dan menjangkau 74.000 perempuan maupun laki-laki hingga memperotek akses terhadap JKN. Tidak hanya sampai di sana, melalui kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah, pada tahun 2019, terdapat 5 kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran daerah mereka secara khusus untuk mendukung pelaksanaan KLIK PEKKA, dan 6 kabupaten/kota telah berkomitmen mengintegrasikan layanan KLIK dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dari Kementerian Sosial.

Kehadiran Yayasan PEKKA sebagai salah satu organisasi Perempuan yang menyentuh secara langsung kelompok perempuan akar rumput di seluruh Indonesia, Yayasan PEKKA meyakini bahwa kontribusi mereka melalui Program MAMPU telah



memberikan sumbangsih yang pantas bagi kesetaraan gender dan masa depan Indonesia yang inklusif. "Yang pertama, pemimpin-pemimpin perempuan dan komunitas PEKKA yang sangat paham arti kemiskinan dan bagaimana memperjuangkan aksesnya yang menjadi penggerak menjamin kesinambungan di tingkat akar rumput," tutur Nani. "Yang kedua, keberadaan Klik PEKKA, yang sekarang sudah menjadi kelembagaan yang diadopsi Pemerintah dengan lahirnya berbagai Kebijakan di tingkat Kabupaten. Kemudian yang ketiga adalah terbangunnya kesadaran kritis dari masyarakat akan haknya atas perlindungan sosial dan juga kesadaran kritis untuk melihat perlindungan sosial ini secara lebih komprehensif."



Sejak 2012, Program MAMPU mendukung kerja Komnas Perempuan dan mitra strategisnya, Forum Pengada Layanan (FPL), untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. FPL merupakan jaringan organisasi yang menyediakan layanan berbasis komunitas terhadap perempuan korban kekerasan. MAMPU mendukung 20 organisasi anggota FPL termasuk 4 hostnya (LBH Apik Aceh, LRC-KJHAM Semarang, Swara Parangpuan Manado dan SAPA Institute Bandung) di 15 provinsi, 33 kabupaten/ kota di lebih dari 100 desa di seluruh Indonesia. "Lembaga layanan sangat terbatas untuk dapat melayani hingga ke pelosok, sehingga dalam upaya mendorong pemenuhan hak perempuan dan kesadaran masyarakat, kami mensosialisasikan hak-hak perempuan, melihat potensi dalam diri para champions dan melatih mereka hingga mampu menjadi paralegal di tingkat komunitas," jelas Veni Siregar, Koordinator Seknas FPL, mengenai bagaimana FPL membangun kapasitas perempuan akar rumput. "Mengapa kita membutuhkan kawan-kawan di komunitas? Karena tidak semua perempuan korban kekerasan mau mendatangi lembaga layanan secara langsung. Sedangkan kawan-kawan di komunitas ini memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitarnya, lebih 'merakyat'. Di sinilah hadir Lembaga Berbasis Komunitas (LBK) yang menjadi 'kawan' bagi perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan," tuturnya.

Melalui kerja sama dengan Program MAMPU, FPL bekerja meningkatkan kapasitas tidak hanya paralegal, pendamping korban, dan lembaga layanan di tingkat komunitas, tetapi juga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Selama 8 tahun bermitra dengan Program MAMPU, FPL dan Komnas Perempuan telah menjangkau lebih dari 18.000 perempuan di seluruh Indonesia, dan mendampingi mereka memperoleh informasi yang tepat untuk mengakses layanan perlindungan kekerasan. Melalui relasi kuat yang dibangun bersama pemerintah pusat dan daerah, FPL juga telah berhasil memengaruhi 38 kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di berbagai tingkat kebijakan.

Menurut Veni, kerja sama yang komprehensif dengan MAMPU, sangat membantu FPL dalam menjangkau Perempuan korban kekerasan dan memperjuangkan pemenuhan hak serta pemulihan korban. "Program MAMPU mendukung 20 organisasi yang tergabung dalam FPL, mulai dari peningkatan kapasitas lembaga layanan, termasuk LBK. LBK bersama lembaga layanan juga berkolaborasi untuk mendorong stakeholder terkait untuk memiliki kapasitas dan keberpihakan terhadap perempuan korban kekerasan. Dari situ mereka akhirnya dapat mendorong adanya anggaran yang responsif gender bagi perempuan korban kekerasan."

FPL secara aktif melakukan advokasi di tingkat nasional seperti pengesahan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTPI) sebagai program prioritas nasional hingga tahun 2021. Berbagai kampanye publik juga dilakukan secara kolektif seperti kampanye 16 Hari Tanpa Kekerasan terhadap Perempuan/Berbasis Gender (16 HAKTPI) dan Hari Perempuan Internasional. "Sama halnya dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di mana proses peradilan dari kasus-kasus kekerasan seksual cukup sulit dijalankan oleh korban karena minim alat bukti, visum yang berbayar, dan sebagainya," tambah Veni.

Nani kemudian menutup, "Saya meminta, menghimbau kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan program seperti ini. Mengalokasikan secara khusus anggaran untuk mengembangkan program-program serupa MAMPU yang memperkuat masyarakat, khususnya perempuan, manusia Indonesia agar bisa betul-betul memperjuangkan, mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan, bagi teman-teman Mitra pelaksana Program MAMPU, kita teruskan apa yang sudah kita bangun, kita teruskan pilot-pilot program, inisiatif-inisiatif, praktek-praktek baik ini menjadi satu kerangka besar untuk membantu pemerintah, untuk membantu bangsa ini bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keadilan gender."

Kegiatan Pengakhiran Program MAMPU

MAMPU mengadakan serangkaian kegiatan menjelang berakhirnya program yang dimulai dengan serial Talkshow "Sapa Perempuan MAMPU" pada pertengahan September 2020 dan ditutup dengan Konferensi Pengakhiran Program MAMPU dibulan Oktober 2020. Dipandu oleh jurnalis senior Kompas, Sonya Helen, serial talkshow daring ini mengundang anggota perempuan OMS

akar rumput mitra Program MAMPU. Talkshow ini secara spesifik mengupas pengalaman perempuan-perempuan hebat, Mitra Program MAMPU di lapangan, dalam meningkatkan kapasitas, membangun organisasi, berjejaring, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan di wilayah kerja mereka yang tidak saja sangat dibutuhkan oleh perempuan,

namun juga warga secara keseluruhan. Siaran ulang talkshow ini dapat ditonton di kanal Twitter @ProgramMAMPU dan YouTube Program MAMPU.

Sementara itu acara puncak adalah Konferensi Pengakhiran Program MAMPU yang berlangsung pada 8 – 9 Oktober 2020 di platform konferensi daring yang disiarkan secara langsung di sejumlah kanal media sosial mitra Program MAMPU dan media massa di sejumlah daerah. Kegiatan ini berhasil mempertemukan para aktor pelaku perubahan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang terdiri dari mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), pemerintah pusat dan daerah, tokoh adat dan agama, lembaga akademik dan riset, serta kelompok dampingan yang selama 8 tahun bahu-membahu bersama Program MAMPU.

Hari pertama Konferensi yang terbuka untuk umum ini diisi dengan sejumlah sambutan pembukaan termasuk dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPP/PA Ibu.)

Gusti Ayu Bintang Darmawati, Charge d’Affaires Kedutaan Besar Australia, Bapak Allister Cox, serta Sekretaris Menteri BAPPENAS, Bapak Himawan Hariyoga Djokokusuma. Setelah sejumlah persembahan seni dan tayangan tonggak sejarah dan pencapaian Program MAMPU, Konferensi Pengakhiran Program MAMPU diisi dengan 3 Dialog Utama yang secara mendalam mengupas tentang perjalanan 8 tahun Program MAMPU dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan, suara dan pengaruh, serta akses perempuan terhadap layanan penting. Dialog Utama menghadirkan pembicara dari para Mitra, diselingi dengan testimony dari penerima manfaat langsung OMS di tingkat akar rumput, pemerintah daerah dan pusat. Siaran ulang Konferensi Pengakhiran MAMPU dapat disaksikan di kanal Twitter @ProgramMAMPU dan YouTube Program MAMPU.

Agenda Hari ke-2 Konferensi diperuntukkan hanya bagi para Mitra MAMPU baik di tingkat nasional dan daerah yang fokus membahas tentang refleksi pembelajaran dan pelaksanaan Program MAMPU.



Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Edisi 17 (Penutup)
Okt - Nov/2020

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter: @ProgramMAMPU

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan